

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

---

Tahun Sidang : 2019-2020  
Masa Persidangan : II  
Rapat ke- : 13  
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Rabu, 19 Februari 2020  
Waktu : 11.00 s.d. 16.10 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta  
Acara : Membahas Program Kerja Tahun Anggaran 2020  
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F.PDIP) dilanjutkan oleh  
G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/  
F.Gerindra)  
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo  
Hadir : A. 36 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:  
1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan);  
2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan);  
3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);  
4. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Plt. Inspektur Jenderal  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);  
5. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Direktur  
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);  
6. Ir. Hudoyo, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian  
Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

7. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
8. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
9. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
10. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
11. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
12. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); dan
14. Ir. Nazir Foad, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut).

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membahas Program Kerja Tahun Anggaran 2020, dibuka pukul 11.00 WIB oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 per Eselon I pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut, terutama terkait program pemberdayaan masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menambah anggaran sebesar Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, serta perbaikan lingkungan hidup, mengingat tingginya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan hutan di Indonesia. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD), untuk

melakukan pendalaman terkait kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, serta perbaikan lingkungan hidup.

3. Komisi IV DPR RI akan melakukan Rapat Kerja dengan beberapa Menteri terkait, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Luar Negeri untuk membahas kebijakan dan penanganan permasalahan impor sampah ilegal. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menindak tegas pelaku impor sampah ilegal dengan mengenakan sanksi yang seberat-beratnya.
4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan, kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pertambangan, kawasan pariwisata, dan kawasan industri serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sehingga dapat dipahami secara utuh efek dari pengembangan wilayah tersebut, baik dari sisi ekonomi, lingkungan hidup, sosial, ideologi, maupun sosial budaya lainnya, sebagai *post policy assesment*.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.10 WIB.

Menteri Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan,

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

Ttd.

**Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar**

**G. Budisatrio Djiwandono**  
**A-127**